

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes: Studi di BUMDes Kecamatan Bulango Timur

Kezia Rozalin Kasman¹, Zulkifli Boku², Nurharyati Panigoro³

Universitas Negeri Gorontalo

kzmankezia@gmail.com, zulkifli.boku@ung.ac.id, nurharyati@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in East Bulango District through the influence of the internal control system, transparency, human resource competence, and the role of village heads. This study uses a quantitative descriptive and causality approach with primary data collected through the distribution of questionnaires to BUMDes managers. Data analysis was carried out to test the influence of each independent variable partially or simultaneously on the accountability of BUMDes management. The findings of this research are expected to contribute to improving more accountable governance of BUMDes, through strengthening aspects of internal control, transparency, improving human resource competence, and optimizing the role of village heads.

Keywords: *Accountability, BUMDes, Internal Control System, Transparency, HR Competence, Role of Village Head*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bulango Timur melalui pengaruh sistem pengendalian internal, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kausalitas dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengelola BUMDes. Analisis data dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola BUMDes yang lebih akuntabel, melalui penguatan aspek pengendalian internal, transparansi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi peran kepala desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Kompetensi SDM, Peran Kepala Desa

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan sebagai pengelola sumber daya ekonomi lokal yang dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi (Aldila et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, pendirian BUMDes bertujuan

untuk mengembangkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, menyediakan layanan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, serta membuka peluang usaha di desa. Namun pada kenyataannya, masih banyak BUMDes yang menghadapi tantangan, khususnya dalam hal akuntabilitas.

Hasil dari sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan dari pemerintah. Hambatan-hambatan tersebut tercermin dalam beberapa aspek, antara lain ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan usaha, rendahnya kualitas tata kelola, serta kurangnya transparansi dalam operasional BUMDes. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor - faktor tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan permasalahan lain, yaitu kurangnya ketelitian pihak desa dalam menetapkan pengurus BUMDes. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bulango Timur, yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan masing - masing BUMDes di wilayah tersebut. Hingga saat ini, masih banyak BUMDes yang belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Padahal, akuntabilitas merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan eksistensi BUMDes itu sendiri.

Adapun faktor - faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes antara lain: sistem pengendalian internal, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa. Akuntabilitas merupakan syarat mutlak dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas tersebut, sumber daya manusia yang bekerja di BUMDes harus memiliki kompetensi yang memadai, karena pengelolaan yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas (Name et al., 2022).

Kecamatan Bulango Timur, yang menjadi lokasi penelitian, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun demikian, wilayah ini juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Dengan latar belakang serta karakteristik desa yang beragam, setiap BUMDes di kecamatan ini memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kecamatan Bulango Timur terdiri atas lima desa, dan masing-masing desa memiliki BUMDes. Berikut ini disajikan tabel klasifikasi BUMDes yang terdapat di Kecamatan Bulango Timur.

Tabel 1. Klasifikasi BUMDes yang ada di Kecamatan Bulango

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Jenis Usaha	Tahun	Ket
1.	Toluwa	Tunas Baru	Jual Beli Beras	2021	Tidak ada laporan pertanggungjawaban

2.	Popodu	Sejahtera	Simpan pinjam dan perdagangan 9 bahan pokok	2017 & 2018	Tidak berjalan lancar
3.	Bulbar	Prima Karya	Sewa tenda, sewa kursi dan jasa orjen	2018 & 2020	Tidak ada laporan pertanggungjawaban
4.	Bulotangi	Mootinelo	Simpan pinjam	2018	Tidak ada laporan pertanggungjawaban
5.	Bultim	Dulohupa	Minyak kelapa kampung, pangkalan gas, dan warung makan	2018, 2020 & 2021	Tidak ada laporan pertanggungjawaban

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar BUMDes di Kecamatan Bulango Timur belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertib. Kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, BUMDes Dulohupa tidak memiliki laporan pertanggungjawaban, meskipun mengelola berbagai jenis usaha seperti jual beli beras, simpan pinjam, dan jasa penyewaan. Beberapa BUMDes lainnya, seperti BUMDes Sejahtera, menghadapi kendala dalam operasional yang berdampak negatif terhadap kinerja lembaga tersebut. Hal serupa juga terjadi pada BUMDes Tunas Baru dan Mootinelo yang menunjukkan kondisi tidak stabil dan tingkat risiko tinggi akibat ketiadaan laporan pertanggungjawaban yang dapat dijadikan acuan evaluasi. Selain itu, terdapat variasi dalam tahun mulai operasional masing-masing BUMDes, yang menunjukkan bahwa meskipun beberapa desa telah mengelola BUMDes lebih lama, kinerja yang dihasilkan masih belum optimal. Secara keseluruhan, BUMDes di Kecamatan Bulango Timur menghadapi tantangan yang cukup serius dalam aspek pengelolaan dan pelaporan. Permasalahan ini perlu segera dibenahi guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas usaha. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis sejumlah faktor yang diduga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes, yaitu: sistem pengendalian internal, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa.

Sistem pengendalian internal harus diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap BUMDes dilakukan oleh Pengawas BUMDes yang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja serta pelaporan keuangan BUMDes. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan aset atau kekayaan BUMDes oleh pengelola BUMDes. Penerapan sistem pengendalian internal ini bertujuan agar proses pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Usman (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hasil-hasil penelitian terdahulu juga mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan

(gap research) terkait faktor - faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menguji dan menganalisis kembali variabel - variabel seperti sistem pengendalian internal, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa sebagai determinan akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bulango Timur. Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan kualitas laporan keuangan desa, penelitian ini secara khusus akan mengkaji kembali variabel - variabel independen tersebut dalam konteks pengelolaan BUMDes. Di samping itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yang meskipun sama dengan beberapa studi terdahulu, namun memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kausalitas. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bulango Timur, khususnya di lima desa: Popodu, Toluwaya, Bulotangi, Bulotangi Timur, dan Bulotangi Barat, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2024.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengelola dan aparat desa yang terkait dengan BUMDes. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: sistem pengendalian internal (X1), transparansi (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), dan peran kepala desa (X4). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 1-5.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Bulango Timur. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan total responden sebanyak 25 orang yang terdiri atas kepala desa, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas BUMDes dari masing-masing desa.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan SPSS, dengan tahapan analisis meliputi uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji t dan uji F), serta analisis regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

di mana Y adalah akuntabilitas pengelolaan BUMDes, X_1 hingga X_4 merupakan variabel independen, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, dan e adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bulango Timur merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Secara geografis, wilayah ini terletak antara 1,10° Lintang Utara hingga 0,20° Lintang Selatan, serta berada pada koordinat 123°40' Bujur Timur hingga 120°20' Bujur Barat. Luas wilayah Kecamatan Bulango Timur mencapai 10,82 km² atau sekitar 0,55% dari total luas wilayah Kabupaten Bone

Bolango, dengan Desa Bulotalangi Timur sebagai desa dengan wilayah terluas. Berdasarkan kondisi bentuk permukaannya, wilayah Kecamatan Bolango Timur sebagian besar terdiri atas daerah bergunung - gunung, sementara area dataran rendah hanya mencakup bagian yang lebih kecil. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Tapa di sebelah timur dan selatan, Kecamatan Tilongkabila di sebelah barat, serta Kecamatan Bolango Selatan di sebelah utara.

Penelitian ini melibatkan responden dari kalangan pengelola BUMDes, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan unit usaha desa. Selain itu, penelitian juga mencakup aparatur desa seperti Kepala Desa dan pengawas BUMDes. Subjek penelitian diambil dari lima desa yang berada di wilayah Kecamatan Bolango Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bolango Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarakan dalam bentuk tautan Google Form.

Tabel 2. Data Sampel Penelitian

No	Uruaian Desa	Responden	Jumlah Responden
1.	Kepala Desa	5	5
2.	Ketua BUMDes	5	5
3.	Sekretaris BUMDes	5	5
4.	Bendahara BUMDes	5	5
5.	Pengawas BUMDes	5	5
Total Responden		25	25

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

No.	Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X1_1 (P1)	0.719	0.396	Valid
2	X1_2 (P2)	0.718		Valid
3	X1_3 (P3)	0.691		Valid
4	X1_4 (P4)	0.703		Valid
5	X1_5 (P5)	0.645		Valid
6	X1_6 (P6)	0.539		Valid
7	X1_7 (P7)	0.681		Valid
8	X1_8 (P8)	0.458		Valid
9	X1_9 (P9)	0.401		Valid
10	X1_10 (P10)	0.578		Valid
11	X1_11 (P11)	0.489		Valid

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

No.	Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	X2_12 (P12)	0.404	0.396	Valid
2	X2_13 (P13)	0.566		Valid
3	X2_14 (P14)	0.405		Valid
4	X2_15 (P15)	0.503		Valid
5	X2_16 (P16)	0.456		Valid
6	X2_17 (P17)	0.527		Valid
7	X2_18 (P18)	0.615		Valid
8	X2_19 (P19)	0.491		Valid
9	X2_20 (P20)	0.433		Valid
10	X2_21 (P21)	0.492		Valid
11	X2_22 (P22)	0.409		Valid

Sumber: Output SPSS Statistik 25

No.	Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	X3_23 (P23)	0.474	0.396	Valid
2	X3_24 (P24)	0.578		Valid
3	X3_25 (P25)	0.721		Valid
4	X3_26 (P26)	0.557		Valid
5	X3_27 (P27)	0.774		Valid
6	X3_28 (P28)	0.699		Valid
7	X3_29 (P29)	0.812		Valid
8	X3_30 (P30)	0.488		Valid
9	X3_31 (P31)	0.546		Valid
10	X3_32 (P32)	0.468		Valid

Sumber: Output SPSS Statistik 25

No.	Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	X4_33 (P33)	0.799	0.396	Valid
2	X4_34 (P34)	0.482		Valid
3	X4_35 (P35)	0.520		Valid
4	X4_36 (P36)	0.438		Valid
5	X4_37 (P37)	0.412		Valid
6	X4_38 (P38)	0.535		Valid
7	X4_39 (P39)	0.417		Valid
8	X4_40 (P40)	0.596		Valid
9	X4_41 (P41)	0.673		Valid
10	X4_42 (P42)	0.400		Valid
11	X4_43 (P43)	0.438		Valid
12	X4_44 (P44)	0.738		Valid
13	X4_45 (P45)	0.676		Valid

Sumber: Output SPSS Statistik 25

No.	Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	Y_47 (P47)	0.420	0.396	Valid

2	Y_48 (P48)	0.640	Valid
3	Y_49 (P49)	0.472	Valid
4	Y_50 (P50)	0.584	Valid
5	Y_51 (P51)	0.712	Valid
6	Y_52 (P52)	0.595	Valid
7	Y_53 (P53)	0.697	Valid
8	Y_54 (P54)	0.591	Valid
9	Y_55 (P55)	0.732	Valid
10	Y_56 (P56)	0.516	Valid

Sumber: Output SPSS Statistik 25

Berdasarkan data dalam Tabel diatas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa, memiliki nilai Rhitung yang lebih besar dari nilai Rtabel (0.396). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner untuk variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk diuji lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Pemerintah X ₁	0.638	12	Reliabel
2	Trasparansi X ₂	0.692	12	Reliabel
3	Kompotensi Sumber Daya Manusia X ₃	0.749	11	Reliabel
4	Peran Kepala Desa X ₄	0.813	14	Reliabel
5	Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Y	0.513	11	Reliabel

Berdasarkan data dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam variabel penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik. Baik variabel independen maupun dependen menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang semuanya melebihi 0,60. Dengan demikian, seluruh pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal X ₁	25	32.00	47.00	41.3200	3.43657

Transparansi X ₂	25	33.00	47.00	42.1200	2.74348
Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₃	25	30.00	48.00	38.5200	3.88501
Peran Kepala Desa X ₄	25	3.00	4.00	3.9200	0.27689
Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Y	25	2.00	5.00	3.8000	0.64550

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Berdasarkan Tabel di atas, variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), Transparansi (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), Peran Kepala Desa (X4), dan Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (Y) memiliki jumlah responden (N) sebanyak 25 orang.

- Untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, nilai yang diperoleh berkisar sebesar 32, maksimum 47, dengan rata - rata 41,32 dan standar deviasi sebesar 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini cenderung tinggi dan data cukup homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini cenderung tinggi dan data yang diperoleh terdistribusi secara merata.
- Variabel Transparansi memiliki nilai minimum tercatat sebesar 33 dan maksimum 47, dengan nilai rata - rata 42,12 dan standar deviasi 2,74. Rata - rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan X1 serta standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini juga tinggi dan lebih merata.
- Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai yang paling luas, yaitu dari 30 hingga 48. Nilai rata - ratanya sebesar 38,52 dengan standar deviasi 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi persepsi yang lebih besar dari responden terhadap variabel ini dibandingkan variabel lainnya.
- Variabel Peran Kepala Desa memiliki nilai minimum sebesar 3 dan maksimum 4, dengan nilai rata - rata 3,92 dan standar deviasi yang sangat kecil, yaitu 0,28. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh responden memberikan penilaian yang tinggi dan konsisten terhadap variabel ini.
- Variabel Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes memiliki nilai minimum sebesar 2 dan maksimum 5, dengan rata - rata 3,80 serta standar deviasi 0,65. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap tingkat akuntabilitas tergolong tinggi dengan penyebaran data yang cukup stabil.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian yang tinggi terhadap seluruh variabel yang diteliti, dengan tingkat penyebaran data yang relatif baik dan tidak menunjukkan adanya nilai ekstrem.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

N	Mean	Std. Deviation	Max Diff (+)	Max Diff (-)	Sig. (2-tailed)
25	-0.7377616	2.7560	0.061	-0.036	0.996

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian menunjukkan Nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,996, yang jauh melebihi batas signifikansi 0,05 ($0,996 > 0,05$), Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis statistik lanjutan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan bahwa variabel-variabel independen tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain dalam sebuah model regresi. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*.

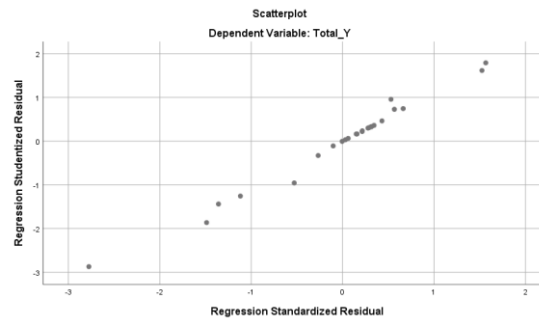
- *Tolerance* mengukur seberapa banyak variabilitas suatu variabel independen yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah menunjukkan adanya potensi multikolinearitas.
- VIF adalah kebalikan dari tolerance dan menunjukkan seberapa besar variabel independen dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam model. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar kemungkinan terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,1$, maka tidak ada masalah multikolinearitas, sehingga model regresi dapat digunakan secara optimal. Berikut adalah hasil Uji multikolinearitas:

Tabel 7. Hasil Uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal X_1	0.975	1.025
Transparansi X_2	0.680	1.472
Kompetensi SDM X_3	0.625	1.600
Peran Kepala Desa X_4	0.889	1.125

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Kepala Desa memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada keempat variabel tersebut. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai VIF untuk keempat variabel tersebut kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik - titik pada grafik scatterplot antara residual dan nilai prediksi tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Titik-titik tersebut juga terdistribusi secara merata di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Pola sebaran ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastis), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut: jika tingkat signifikansi < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi > 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. Adapun nilai T tabel untuk $n = 25 - 4 - 1$ adalah 2,086.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien B	Std. Error	Beta	t_{hitung}	Sig.
(Konstanta)	1,597	2,732		0,584	0,566
Sistem Pengendalian Internal (X_1)	0,050	0,024	0,210	2,300	0,030
Transparansi (X_2)	0,055	0,26	0,280	2,150	0,042
Kompetensi SDM (X_3)	0,045	0,021	0,230	2,120	0,045
Peran Kepala Desa (X_4)	1,330	0,588	0,570	2,262	0,035

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Berdasarkan data pada tabel di atas:

- a) Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,030, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,030 < 0,05$). Selain itu, nilai thitung sebesar 2,300 lebih besar dari ttabel sebesar 2,086 ($2,300 > 2,086$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti variabel X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.
- b) Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,042, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,042 < 0,05$). Selain itu, nilai thitung sebesar 2,150 lebih besar dari ttabel sebesar 2,086 ($2,150 > 2,086$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.
- c) Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah 0,045, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$). Selain itu, nilai thitung sebesar 2,120 lebih besar dari pada ttabel 2,086 ($2,120 > 2,086$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti variabel X3 memiliki pengaruh signifikansi terhadap Y.
- d) Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah 0,035, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$). Selain itu, nilai thitung sebesar 2,262 lebih besar dari pada ttabel 2,086 ($2,262 > 2,086$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti variabel X4 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6.000	4	1.500	7.500	0.001
Residual	4.000	20	0,200		
Total	10.000	24			

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 9 di atas, Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai fhitung $7,500 >$ dari ftabel, dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, model regresi dapat dikatakan signifikan secara simultan, artinya variabel - variabel independen secara Bersama - sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi R² Adjusted

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien determinasi R² Adjusted

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.800	0.640	0.600	3.0000

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,600 atau 60%. Dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 60%

Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien B	Std. Error
(Konstanta)	1,597	2,732
Sistem Pengendalian Internal (X_1)	0,050	0,024
Transparansi (X_2)	0,055	0,26
Kompetensi SDM (X_3)	0,045	0,021
Peran Kepala Desa (X_4)	1,330	0,588

Sumber: *Output SPSS Statistik 25*

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 8,135 + 0,260 + 0,064 + 0,245 + 0,104 + e$$

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa model persamaan regresi linier berganda yaitu:

(α): Nilai konstanta sebesar 1,597 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan (nilai = 0), maka nilai akuntabilitas pengelolaan BUMDes secara teoritis adalah sebesar 1,597.

(β_1): Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,050, yang berarti setiap peningkatan dalam sistem pengendalian internal akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebesar 5% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

(β_2): Variabel Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,055, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes juga akan meningkat sebesar 5,5%.

(β_3): Variabel Kompetensi SDM memiliki koefisien regresi sebesar 0,045, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes akan meningkat sebesar 4,5%

(β_4) : Variabel Peran Kepala Desa memiliki koefisien regresi sebesar 1,330, yang berarti semakin besar peran kepala desa, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes akan naik sebesar 133%.

Pengaruh sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperoleh nilai thitung sebesar 2,300 dengan tingkat signifikansi 0,030. Karena nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,300 > 2,086$) dan signifikansi lebih kecil dari ($0,030 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (Y). Temuan ini mencerminkan bahwa pengelola BUMDes di Kecamatan Bulango Timur memiliki pemahaman yang baik mengenai penerapan sistem pengendalian internal. Sistem tersebut meliputi kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional BUMDes dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara teoritis, hasil ini memperkuat teori keagenan (*agency theory*), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan mekanisme penting untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh agen, seperti pengelola BUMDes dan aparat desa. Sistem ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, serta mengurangi kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara kedua pihak.

Pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan dalam pengelolaan. Dengan sistem yang kuat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat ditingkatkan. Pengelola wajib mematuhi prosedur operasional dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala, sehingga memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja BUMDes. Ini juga mendorong terciptanya rasa tanggung jawab di kalangan pengelola melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Efektivitas pengendalian internal tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan sistem ini mendorong keterlibatan aktif pengurus BUMDes dan aparatur desa dalam membangun lingkungan pengendalian yang mendukung, melalui sikap, kesadaran, dan tindakan yang konsisten.

Pengelola BUMDes juga dituntut untuk mampu menilai potensi risiko di masa depan, guna mencegah kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta merancang kebijakan yang dapat mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan BUMDes (Usman, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes. Hal ini karena pengurus BUMDes dan aparatur desa di Kecamatan Bulango Timur telah menerapkan sistem tersebut secara optimal. Hasil ini konsisten dengan temuan Usman (2023), yang menyatakan bahwa semakin baik pengawasan internal yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes

Berdasarkan uji t variabel Transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,042 < 0,05$), serta nilai thitung sebesar 2,150 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,086 ($2,150 > 2,086$). Berdasarkan hasil ini, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti Transparansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (Y). Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori keagenan (*agency theory*), yang menempatkan transparansi sebagai instrumen penting dalam menurunkan tingkat asimetri informasi antara agen (pengelola BUMDes dan pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat). Dalam hubungan keagenan, agen memiliki akses dan kontrol terhadap informasi operasional serta keuangan, sementara prinsipal bergantung pada informasi yang disampaikan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Ketika transparansi diterapkan dengan baik, masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai aktivitas serta kondisi keuangan BUMDes.

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pendapatan BUMDes digunakan, serta apa saja hasil yang telah dicapai. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelola, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Transparansi juga menciptakan tekanan moral dan sosial bagi pengelola agar bertindak jujur dan bertanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tindakan mereka dapat diketahui dan dinilai oleh publik. Dalam konteks Kecamatan Bulango Timur, penerapan prinsip transparansi menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat, baik melalui laporan berkala, papan informasi, maupun forum - forum musyawarah desa. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, risiko terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dapat ditekan, karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka semakin besar pula kemungkinan tercapainya tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas yang efektif dapat tercapai apabila pengelola BUMDes dan aparatur desa melaksanakan tugasnya secara jujur, terbuka, mematuhi prosedur yang berlaku, serta menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wishmilia dan Akbar (2023), yang menyimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,045 < 0,05$). Selain itu, nilai thitung sebesar 2,120 lebih besar daripada ttabel sebesar 2,086 ($2,120 > 2,086$). Dengan demikian, H_a diterima

dan H_0 ditolak, yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (Y). Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan BUMDes yang akuntabel. Pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab akan lebih mudah dicapai jika pengelola BUMDes memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, serta kemampuan kerja sama yang memadai. Di Kecamatan Bulango Timur, latar belakang dan kapasitas aparatur desa serta pengelola BUMDes dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur kerja, kedisiplinan dalam pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas teknis dan manajerial para pengelola. Kompetensi yang tinggi memungkinkan agen (dalam hal ini pengelola BUMDes dan aparatur desa) untuk menjalankan amanah dari prinsipal, yaitu masyarakat desa, secara optimal dan profesional.

Dalam kerangka teori keagenan, kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat memperkecil risiko penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Teori ini menekankan bahwa hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pengelola BUMDes) membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang kuat guna mengatasi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*). Agen yang kompeten lebih mampu menyampaikan informasi secara akurat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh prinsipal. Dengan penerapan prinsip - prinsip teori keagenan, seperti keterbukaan, pelaporan yang transparan, serta kesesuaian dengan prosedur, maka potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes akan meningkat. Akuntabilitas dapat terwujud secara optimal ketika pengelola bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang dilakukan (Mahmudi, 2011). Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Amelia et al. (2024), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengaruh Peran Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Peran Kepala Desa (X_4) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (Y) adalah 0,035, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$), serta nilai thitung sebesar 2,262 lebih besar dari ttabel sebesar 2,086 ($2,262 > 2,086$). Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang mengindikasikan bahwa Peran Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kepala desa memiliki peran strategis sebagai penasihat dalam struktur organisasi BUMDes. Tugas utama yang dijalankan meliputi koordinasi, evaluasi kegiatan usaha, serta penyampaian laporan hasil kegiatan kepada masyarakat. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Temuan ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (pengelola BUMDes serta pemerintah desa). Dalam hubungan ini, masyarakat memberikan amanah kepada pengelola untuk menjalankan usaha desa, dengan harapan bahwa agen akan bertindak sesuai kepentingan masyarakat. Namun, karena adanya ketimpangan informasi (information asymmetry), konflik kepentingan kerap terjadi. Dalam konteks ini, kepala desa bertindak sebagai penghubung sekaligus pengawas, memastikan bahwa pengelola BUMDes menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Berdasarkan teori keagenan, agen berkewajiban untuk melaporkan kinerja secara terbuka dan menyampaikan informasi yang jujur kepada prinsipal guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperkuat oleh penelitian Akbar et al. (2022), yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi untuk meminimalkan konflik dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, Aldila et al. (2018) juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan komponen penting dalam membangun tata kelola BUMDes yang baik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Kepala Desa Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan dalam tabel 11, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,472 lebih besar dari nilai F_{tabel} , serta nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X1), transparansi (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), dan peran kepala desa (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes (Y).

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas tidak dapat dicapai hanya melalui perbaikan satu aspek pengelolaan saja, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh elemen yang terkait. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme formal untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan kegiatan usaha. Transparansi mendorong keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat. Kompetensi sumber daya manusia memastikan bahwa pelaksana kegiatan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas secara profesional dan efektif. Sementara itu, peran kepala desa sebagai penasihat strategis dalam struktur organisasi BUMDes berperan dalam memfasilitasi koordinasi, evaluasi, serta pelaporan kepada masyarakat.

Dari sudut pandang teori keagenan, hasil ini memperkuat pentingnya implementasi prinsip - prinsip tata kelola yang baik dalam hubungan antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (pengelola BUMDes serta kepala desa). Masyarakat sebagai pihak pemberi mandat memiliki ekspektasi bahwa agen akan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal, transparansi informasi,

peningkatan kapasitas SDM, dan kepemimpinan yang efektif merupakan mekanisme pengendalian yang mampu meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi yang potensial terjadi dalam hubungan keagenan. Dengan demikian, temuan ini memberikan implikasi bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang optimal, diperlukan integrasi yang harmonis antara aspek pengawasan, keterbukaan informasi, kapabilitas pengelola, dan peran strategis kepala desa sebagai penghubung antara masyarakat dan pengelola usaha desa. Pendekatan simultan terhadap variabel - variabel tersebut menjadi penting dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Pengelolaan yang dilakukan secara efisien dan sesuai prosedur melalui sistem pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan risiko penyimpangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip teori keagenan yang menekankan pentingnya pengawasan dalam hubungan antara agen dan prinsipal.
2. Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Penerapan prinsip transparansi, seperti keterbukaan informasi dan pelaporan yang akurat, mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola. Transparansi juga menurunkan risiko konflik kepentingan dalam hubungan keagenan.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Agen yang kompeten akan mampu menjalankan amanah masyarakat secara optimal dan akuntabel.
4. Peran Kepala Desa terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kepala desa sebagai penasihat strategis dan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola yang baik, melalui koordinasi, evaluasi, dan pelaporan yang transparan kepada masyarakat. Peran ini penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat sebagai pihak pemberi mandat.
5. Secara simultan, keempat variabel independen sistem pengendalian internal, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran kepala desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh elemen pengelolaan.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 7 (2025) 3098 - 3118 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i7.7881

Pendekatan holistik ini mendukung penciptaan tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik, sesuai dengan kerangka teori keagenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D. M. (2024). Desain Penelitian Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian* (Issue November).
- Adolph, R. (2016). *RENSTRA BAPPEDA 2021-2026*
- Agusliansyah, Khairul. (2016). "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4.4 : 1785-1796. [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%20\(01-06-17-10-18-21\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%20(01-06-17-10-18-21).pdf). Diakses Tanggal 6 November 2020
- Aini, S. N. (2023). Analisis Transparan dan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Studi pada Pelayanan Pemungutan Pajak Hiburan). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5).
- Aldila, B., Nikmatullah, D., & Hasanuddin, T. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon GistingBawah. *Jurnal Ilmu Agribisnis*, 6(2), 214-221. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/2788/2334>
- Ali, R. B., Harun Blongkod, & Nurharyati Panigoro. (2024). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada Nasabah Usaha Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Utara). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 39–56. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1753>
- Amaliyah, D., & Utomo, S. P. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3), 32–39.
- Amelia, F., Hamdani, & Juniar Asrid. (2024). Determinan Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis TataKelola Organisasi yang Baik. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 639–646.
- Anowta, M. U. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dimoderasi Oleh Peran Kepala Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12), 3316–3333. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p15>
- Apriliasari, K., & Mawardi C. M. (2022). Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari), Dalam *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 11).
- Aziiz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 6 No. 2 e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695. Hal 280-344.

- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahera, G. I., & Satyawan, M. D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5193–5201. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1911>
- Indrianti, M., & Harahap, W. S. M. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yatim Mandiri Medan. *Jurnal Mirai Management*. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/6180>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Name, P., Count, W., Count, C., Count, P., Size, F., Date, S., & Date, R. (2022). *4638 Words Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan*.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing& Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulus, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tomposo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–9.
- Puspitasari, M., & Adi, P. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 21–41. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p21-41>
- Roni Setiawan, Raihan Aditya Perkasa, & Zacky Maulana. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 103–108. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1330>
- Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., Hambani, S., & Agustin, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 8(1), 76–85. <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.5774>
- Sihotang, A. M., Hanif, R. A., Riau, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (2024). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Gaya Kepemimpinan , dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya)*. 1(2), 691–703.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>

- Suhendri, H., Hardianto, W. T., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 16–24. <https://doi.org/10.33366/ref.v11i2.5002>
- Supraja, G., Mustafa, M., & ... (2023). Study of the Use of Accounting Information at BUMDES in Pematang Serai Village, Langkat Regency. *Proceeding of The ...*, 1(2), 31–42. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/icbe-untagsmg/article/view/674%0Ahttps://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/icbe-untagsmg/article/download/674/638>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Usman, U. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo* *The Influence of Accountability and Internal Supervision on Bumdes Financial Management in Kabila Bone District , Gorontalo Provi.* 2(2), 63–76.
- Wishmilia, S. A., & Akbar, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1).